

Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional

Yessi Olivia, SIP, MIntRel*

Abstract

This paper describes the application of the system-level analysis and international relations theories in the case of Arms Trade Treaty (ATT) voting in the General Assembly, United Nations, in 2 April 2013. System-level analysis is part of the three levels of analysis commonly used in International Relations (IR). This paper suggests that the choice of a specific level of analysis interlinks with the theory preference. In the case of system-level analysis, all of the theories applied in analysing the ATT voting assume the nature of the international system (international anarchy) affects states behavior. In regard to the case of ATT voting, there are four research questions raised in this paper. Firstly, what did the various results of the ATT voting mean? Second, why did Indonesia choose for abstention in the voting? Third, why did North Korea, Iran and Syria decide to vote against ATT? And lastly, what will the future of arms trade regime hold under the ATT?

Keywords: International Relations Theory, Level Analysis, International System, Arms Trade Treaty.

Pendahuluan

Ilmu Hubungan Internasional (HI) dikenal dengan beragamnya pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan/atau memahami fenomena internasional. Teori-teori HI, baik yang muncul dari kajian HI itu sendiri ataupun yang dipinjam dari disiplin ilmu yang lain, terkelompokkan ke dalam paradigma atau perspektif. Bagaimana teori-teori ini bisa tergabung ke dalam sebuah paradigma? Salah satu cara pengelompokkan teori-teori di dalam studi HI adalah dengan melihat objek penelitian dan variabel-variabel seperti kekuatan militer (*military power*), kepentingan material (*material interests*), dan ideologi (*ideological beliefs*).¹ Oleh sebab itu, ketika peneliti HI berbicara tentang negara yang memaksimalkan kekuatan militer untuk mencapai kepentingan nasionalnya, maka peneliti tersebut akan banyak menggunakan paradigma realis. Sebaliknya kalau penelitian mengkaji tentang gap antara negara kaya dengan negara miskin, dominasi negara-negara kaya dalam perekonomian internasional maka penelitian tersebut lebih banyak menggunakan paradigma *critical theory*.

Cara lain mengelompokkan teori di dalam studi HI adalah dengan melalui level analisis. Secara ringkasnya level analisis adalah “unit (individu, negara atau sistem) yang menjadi fokus

* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

¹ Anna-Marie Slaughter, *International Relations, Principal Theories*, (Princeton: Princeton University, 2011) Tersedia di
<http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf>
[Diakses 1 Juli 2013]

dari sebuah teori”.² Dengan mengambil studi kasus tentang voting negara-negara anggota PBB tentang mengenai perdagangan senjata pada bulan April 2013, tulisan ini akan memaparkan pengaplikasian level analisis sistem dan teori HI.

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai definisi level analisis dan menjabarkan beberapa level analisis yang digunakan. Bagian kedua dalam tulisan ini akan mendeskripsikan tentang *Arms Trade Treaty*, sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata konvensional. Selain itu akan dibahas pula mengenai status ATT berdasarkan hasil voting pada tanggal 2 April 2013 yang lalu.

Bagian terakhir dari tulisan menggambarkan keterhubungan antara level analisis sistem dengan teori-teori neo-realis dan neo-liberal yang membahas tentang pengaruh dari bentuk sistem internasional yang anarki terhadap perilaku negara. Beberapa pertanyaan terkait dengan kasus voting ATT akan dibahas dalam tulisan ini. Pertama terkait dengan beragamnya hasil voting ATT pada bulan April tersebut. Mengapa suara negara-negara terbagi menjadi tiga: menyetujui, menolak dan abstain? Kedua, mengapa Indonesia mengambil posisi abstain dalam voting ATT? Pertanyaan ketiga mengapa tiga negara, yakni Korea Utara, Iran dan Suriah, menolak ATT? Pertanyaan terakhir bagaimana masa depan rezim perdagangan internasional di bawah ATT?

Level Analisis di Dalam HI

Fenomena di dalam hubungan internasional itu ibarat sebuah permainan *puzzle* yang membingungkan. Mengapa ada negara yang terlibat perang? Mengapa negara mau berdamai? Mengapa negara memilih kebijakan X sementara negara lain memilih kebijakan Y? Mengapa ada beragam perilaku yang ditunjukkan oleh aktor-aktor internasional padahal aktor-aktor ini tinggal di dalam lingkungan yang sama?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas bisa didapat dengan mengkaji berbagai hal diawali dengan melihat lingkungan tempat aktor-aktor berinteraksi (atau yang biasa disebut sebagai sistem internasional). Apa bentuk atau karakter dari sistem internasional? Bagaimana sistem tersebut berubah dan mempengaruhi perilaku negara? Peneliti juga bisa mendapat

² Paul D’Anieri, *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, 2nd ed. (Boston: Wadsworth, 2012), hal. 19.

jawaban dengan melihat dinamika politik domestik sebuah negara. Aktor-aktor mana saja selain pemerintah yang memiliki peran besar dalam pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara? Bagaimana proses pengambilan kebijakan di negara tersebut? Selain melihat faktor eksternal dan internal aktor, jawaban juga bisa didapat dengan menganalisis perilaku individu atau bahkan kelompok sebagai pengambil kebijakan luar negeri sebuah negara.

Masing-masing variabel di atas memiliki skala penelitian yang tentunya berbeda satu sama lain. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian pun tentunya akan beragam pula. Ada yang akan menghasilkan jawaban umum berdasarkan pengamatan terhadap pola aktor yang terus berulang di dalam sistem internasional. Ada pula yang akan menghasilkan jawaban yang mendetil karena hal-hal seperti karakter aktor yang berbeda dianggap memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan aktor. Seorang peneliti HI dalam hal ini harus membuat pilihan dalam penelitiannya. Di mana fokus penelitian? Pada sistemkah, negara, masyarakat, atau pada individu?

Penetapan fokus penelitian inilah yang kemudian disebut sebagai level analisis. Menurut Waltz³, level analisis adalah faktor-faktor penjas, sementara bagi Singer⁴ level analisis adalah target analisis di mana peneliti dapat memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*) dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara. Dari beragam definisi lain tentang level analisis, ringkasnya level analisis akan membantu peneliti untuk menemukan variabel mana yang sangat menentukan tindakan aktor.

Pada dasarnya ada tiga level analisis dalam menjelaskan kebijakan aktor negara. Pertama adalah sistem (*system-level analysis*). Level analisis sistem disebut sebagai tingkat analisis yang paling komprehensif di antara level analisis yang ada karena “dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka”.⁵ Selanjutnya level analisis sistem akan menjelaskan pengaruh distribusi kekuatan antar negara-negara *super power* terhadap negara-negara lain. Singkatnya, apabila peneliti mengambil level analisis sistem, peneliti tersebut harus memahami bagaimana bentuk dari sistem internasional dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi tindakan aktor.

³Kenneth Waltz, *Man, the State and War* (New York: Columbia University Press, 2001)

⁴David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations”, *World Politics*, Vol. 14, No. 1 (1961), 77-92.

⁵ Bruce Russett & Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W. H. Freeman Company, 1996) hal. 11

Level analisis kedua adalah negara (*state-level analysis*). Pada level analisis ini, penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke⁶, yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Tingkat analisis negara akan menghasilkan penjelasan yang tidak terlalu makro seperti yang dihasilkan pada tingkat analisis sistem, namun tidak pula terlalu mikro seperti ketika menggunakan level analisis individu.

Level analisis terakhir adalah individu (*individual-level analysis*). Pada level analisis ini fokus penelitian ada pada manusia sebagai aktor. Yang diperlukan tentunya pemahaman akan beragam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seorang individu (*human nature*). Level analisis individu juga bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana individu bertinteraksi dalam kelompok (*organizational behavior*) atau bagaimana faktor idiosinkratik berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri (*idiosyncratic behavior*).⁷

Masing-masing level analisis memiliki kelebihan dan kekurangan. Level analisis sistem misalnya, memiliki keunggulan dalam memberikan analisis yang mencakup keseluruhan interaksi aktor di dalam sistem dari hasil generalisasi perilaku negara. Kelemahan dari level analisis sistem selain membesar-besarkan dampak dari sistem terhadap perilaku negara adalah terabaikannya faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap perilaku negara, seperti sejarah, kondisi internal negara dan lain-lain. Pada level analisis negara, perilaku negara akan dijelaskan dengan melihat karakter negara yang beragam, misalnya tipe pemerintahan, kondisi dan kebijakan negara. Penjelasan yang didapat dengan menggunakan level analisis ini tentunya akan lebih detail namun peneliti tidak bisa menghasilkan pemodelan ketika masing-masing negara diperlakukan sebagai entitas yang berbeda.⁸

Di dalam perkembangannya, level analisis di dalam HI tidak hanya terpaku pada tiga tingkatan tersebut di atas. Russett dan Starr⁹ misalnya menawarkan ada enam level analisis. Pertama adalah individu (*individual*). Faktor-faktor seperti pendidikan, kepribadian dan bahkan

⁶ John T Rourke, *International Politics on the World Stage*, 5th ed., (Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995)

⁷ *ibid.*

⁸ Singer, *loc.cit.*

⁹ Russett & Starr, *op.cit.* hal. 13-16

kesehatan, merupakan hal-hal yang akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Kedua adalah peran (*roles*). Apa peran si pengambil keputusan. Apakah ia bertindak sebagai pemimpin sebuah organisasi, institusi atau negara? Pemimpin akan dihadapkan pada berbagai tekanan dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan ini mulai dari kepentingan organisasi atau bahkan aturan-aturan yang tidak tertulis yang telah dijalankan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

Ketiga adalah pemerintah (*government*). Bagaimana struktur pemerintahan sebuah negara akan berdampak kepada pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter misalnya memberikan kewenangan yang luas kepada pemimpin untuk mengambil keputusan, namun ancaman akan adanya kudeta akan selalu ada berbeda dengan negara penganut sistem demokratik yang memberikan otoritas kepada pemimpin dengan batas waktu tertentu. Keempat adalah masyarakat (*society*). Karakter masyarakat sebuah negara dalam hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya perekonomian. Negara kaya misalnya memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan negara miskin. Kelima adalah hubungan internasional (*international relations*). Level analisis ini memfokuskan pada bentuk hubungan antar negara yang dibentuk oleh kebijakan masing-masing negara. Terakhir adalah sistem dunia (*world system*). Bagaimana karakter sistem dunia yang ada mempengaruhi perilaku negara. Dunia yang didominasi oleh dua negara *super power* yang saling bersaing akan berbeda dengan dunia yang dikuasai oleh empat atau lima negara *super power*.

Teori HI dan Sistem Internasional

Ada dua kelompok teori HI yang melihat bahwa perilaku aktor dipengaruhi oleh sistem internasional. Pertama adalah neo-realis atau realis struktural. Bagi kelompok neo-realis sifat dasar manusia bukanlah penyebab persaingan antar negara dalam merebut *power*. Bentuk dari sistem internasional-lah yang berpengaruh terhadap perilaku negara-negara. Sistem internasional yang tanpa otoritas lebih tinggi (kondisi yang disebut sebagai anarki internasional) berdampak pada perilaku negara. Salah satunya adalah meningkatkan pertahanannya karena tidak adanya jaminan negara lain tidak akan menyerang mereka.¹⁰

¹⁰ John Mearsheimer, "Structural Realism" dalam *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, dieditori Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 72.

Kedua adalah kelompok neo-liberal. Kelompok neo-liberal, terutama neo-liberal institusionalisme, menyetujui asumsi kelompok neo-realis bahwa aktor-aktor internasional tinggal di dalam lingkungan yang anarki. Namun, tidak seperti kelompok neo-realis yang melihat interaksi antar aktor diwarnai dengan kecurangan dan konflik, kelompok neo-liberal lebih optimis melihat hubungan internasional. Bagi kelompok neo-liberal, kerja sama di dalam lingkungan yang anarki bukan tidak mungkin dilakukan. Pembentukan rezim internasional diyakini akan mengurangi dampak negatif dari ketiadaan otoritas di dalam sistem internasional.¹¹

Asumsi kelompok neo-realis dan neo-liberal ini sejalan dengan fokus dari level analisis sistem, bahwa karakter dari sistemlah yang menentukan mengapa negara mengambil kebijakan yang berbeda dengan negara lain. Selain dari bentuk sistem internasional, level analisis sistem juga melihat bagaimana hubungan antar negara-negara *super power* menjadi faktor yang menentukan jalannya politik internasional.

Studi Kasus: Voting Arms Trade Treaty di Majelis Umum PBB Tanggal 2 April 2013

Arms Trade Treaty (ATT) adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengatur perdagangan senjata konvensional yang meliputi: tank baja, kendaraan perang, sistem artileri dengan kaliber besar, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, misil dan beserta *launcher*-nya, senjata kecil dan ringan. Negosiasi isi perjanjian ini dimulai pada tanggal 2-27 Juli, 2012 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 18-28 Maret 2013 di markas besar PBB di New York.

Menurut *United Nations Office for Disarmament Affairs* (UNODA), pengaturan perdagangan persenjataan diperlukan karena¹²:

“...ketersediaan senjata dan amunisi telah menyebabkan kesengsaraan, tindakan kriminal dan teror di kalangan penduduk sipil. Perpindahan senjata melalui cara-cara yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan ketidakstabilan sebuah kawasan, melanggar embargo senjata yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB dan berkontribusi terhadap pelanggaran HAM.”

¹¹ Tim Dunne, “Liberalism” dalam *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, dieditori John Baylis & Steve Smith (Oxford: Oxford University Press, 2001)

¹²UNODA, 2013. *About the Arms Trade*, (UNODA, 2013) Tersedia di <<http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTrade/>>, [Diakses 31 Maret 2013]

ATT diharapkan mencakup aturan dan standar yang kuat tentang perdagangan senjata konvensional, suatu hal yang selama ini belum pernah dilakukan. Pengawasan tentang penggunaan senjata di wilayah domestik sebuah negara tidak diatur di dalam draf ATT.

Yang diatur di dalam ATT antara lain adalah sebagai berikut¹³:

1. Larangan jual beli senjata kepada negara yang tengah mendapat sanksi berupa embargo oleh PBB
2. Larangan jual beli senjata ilegal (*illicit arms*)
3. Larangan menjual senjata apabila negara eksportir senjata mengetahui bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk genosida, kejahatan perang dan pelanggaran HAM lainnya.
4. Larangan menjual senjata apabila negara eksportir senjata melihat potensi pelanggaran HAM atas penjualan senjata tersebut

Perundingan tentang perjanjian perdagangan senjata pada tanggal 18-23 Maret 2013 tidak membuahkan hasil karena tiga negara yaitu Iran, Korea Utara dan Suriah menolak adopsi ATT secara konsensus (kesepakatan dari seluruh anggota Majelis Umum). Akibatnya ATT harus melewati proses voting (pemungutan suara) pada tanggal 2 April 2013 dengan hasil sebagai berikut: 154 negara menyetujui, 23 abstain dan 3 negara, yaitu Korea Utara, Suriah dan Iran, menolak. ATT saat ini telah ditandatangani oleh 74 negara, termasuk dua negara pemegang hak veto: Perancis dan Inggris.¹⁴ Sebagaimana perjanjian internasional lainnya, ATT harus menunggu ratifikasi dari 50 negara untuk dapat beroperasi.

Kasus pemungutan suara tentang perjanjian perdagangan senjata di PBB pada bulan April 2013 memunculkan berbagai pertanyaan. Dimulai dari mengapa ada perbedaan pendapat di antara negara-negara tentang ATT? Mengapa ada yang menolak? Mengapa pula ada yang abstain? Lalu bagaimana kelanjutan dari perjanjian ini apabila negara-negara sepakat untuk membentuk sebuah rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan senjata?

¹³ Perserikatan Bangsa Bangsa, *Arms Trade Treaty* (Perserikatan Bangsa Bangsa, 2013) Tersedia di <http://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%2012-01%20PM/Ch_XXVI_08.pdf#page=21> [Diakses 25 Juni 2013]

¹⁴ UNODA, *The Arms Trade Treaty* (UNODA, 2013) Tersedia di <<http://www.un.org/disarmament/ATT/>> [Diakses 25 Juni 2013]

Berikut di bawah ini analisis-analisis terkait dengan pertanyaan di atas. Analisis didasarkan pada teori neo-realis dan neo-liberal yang keduanya memiliki asumsi yang sama tentang sistem internasional yang anarki.

1. Apa Arti dari Beragamnya Hasil Voting ATT?

Kenneth Waltz¹⁵ berpendapat bahwa penjelasan perilaku negara ada pada bentuk sistem internasional yang unik. Tidak seperti politik domestik yang memiliki tatanan yang hierarkis dimulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga unit yang terkecil dalam pemerintahan, politik internasional tidak memiliki pemerintah pusat. Dengan menggunakan ‘pasar’ sebagai perumpamaan, Waltz mengibaratkan negara seperti perusahaan-perusahaan yang saling berkompetisi untuk memperoleh keuntungan. Di dalam kondisi di mana tidak ada otoritas tertinggi (anarki internasional), negara hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri (*self help*) untuk bertahan hidup.¹⁶ Karena negara harus mengandalkan pada kemampuannya sendiri, negara-negara akan selalu awas terhadap serangan negara lain.

Lalu bagaimana kelompok realis menjelaskan fenomena kerja sama internasional seperti yang dilakukan oleh negara-negara dalam organisasi seperti PBB? Sikap pesimis kelompok realis tentang bentuk hubungan internasional yang konfliktual ditunjukkan pula dalam analisis mengenai kerja sama internasional dan kemampuan organisasi internasional untuk mewujudkan kerja sama tersebut.

Pertama, di dalam kerja sama internasional negara akan khawatir terhadap perolehan relatif (*relative gains*) yang didapat oleh negara-negara lain dan kecurangan yang dilakukan negara-negara dalam bekerja sama. Pertimbangan akan perolehan relatif inilah yang kemudian menghasilkan berbagai sikap negara dalam kerja sama internasional, mulai dari “menolak untuk ikut, meninggalkan kerjasama tersebut, atau membatasi komitmen mereka apabila negara-negara lain dipercaya akan memperoleh keuntungan lebih dari kerjasama tersebut”.¹⁷

Kedua, walaupun kelompok realis melihat institusi internasional dibentuk untuk mewadahi kerja sama antar negara, kelompok ini melihat institusi internasional itu sebagai refleksi dari distribusi kekuatan (*balance of power*) di dalam sebuah sistem. Negara-negara

¹⁵ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (London: Addison-Wesley Publishing Company, 1979)

¹⁶ *ibid.*, hal. 111

¹⁷ Joseph M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism”, *International Organization*, Vol. 42, Iss. 3 (1988), 485-507 (hal. 499)

besar dalam hal ini, membentuk institusi supaya “mereka dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekuatan mereka”.¹⁸ Oleh karena itu kerja sama yang dibuat dalam sebuah institusi internasional tentunya merupakan upaya dari negara-negara besar untuk mempertahankan atau memaksimalkan power mereka dalam politik internasional.

Upaya negara-negara besar untuk mendapat keuntungan sangat tergambar dari perumusan perjanjian perdangan senjata di bawah PBB. Untuk diketahui, jual beli senjata adalah bisnis yang sangat besar dengan keuntungan mencapai US\$ 70 milyar.¹⁹ Yang menarik dari bisnis ini adalah sebagian besar keuntungan tersebut dinikmati oleh negara-negara *Permanent Five* yang merupakan negara-negara eksportir senjata terbesar di dunia.²⁰ Apabila negara-negara besar, seperti yang dikatakan oleh kelompok realis, selalu berupaya untuk memastikan negara lain tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dari mereka, maka ATT dapat diartikan sebagai upaya *balance of power* negara-negara eksportir senjata.

Beragamnya hasil voting pada tanggal 2 April 2013 menunjukkan betapa negara-negara telah mempertimbangkan perolehan relatif dan absolut yang akan didapat dari perjanjian ini. China dan Rusia memilih abstain karena ATT akan berdampak pada ekspor senjatanya. Hal ini dikarenakan negara-negara klien China dan Rusia kebanyakan adalah negara-negara yang memiliki catatan HAM yang buruk, seperti Kongo, Myanmar, Sudan dan Zimbabwe.²¹ Dengan adanya persyaratan HAM di dalam traktat tersebut, proses penjualan senjata Rusia dan China kepada negara-negara klien tentunya akan terhambat.

Selanjutnya negara-negara seperti Indonesia dan India yang alat utama sistem senjata atau alutsistanya masih bergantung pada senjata dari luar negeri akan melihat ATT sebagai sesuatu yang dilematis sifatnya.²² Karena keduanya adalah negara demokrasi terbesar yang

¹⁸John Mearsheimer, “The False Promise of International Institutions”, *International Security*, Vol. 19, No. 3, (1994), 5-49.

¹⁹Oxfam, *Arms Trade Treaty May Point a Way Forward for the U.N.*, (Oxfam, 2013) Tersedia di <<https://www.oxfam.org.au/2013/04/arms-trade-treaty-may-point-a-way-forward-for-the-u-n/>>, [Diakses 22 April 2013].

²⁰Sergio Finardi, Brian Wood, Peter Danssaert & Ken Matthysen, “The Arms Trade Treaty: Building A Path to Disarmament”, *Solutions*, Vol. 4, Iss. 3, (2013). Tersedia di <<http://thesolutionsjournal.anu.edu.au/node/2271>>, [Diakses 22 April 2013].

²¹Amnesty International, *The ‘Big Six’ Arms Exporters*, (Amnesty International, 2012) Tersedia di <<http://www.amnesty.org/en/news/big-six-arms-exporters-2012-06-11>> [Diakses 22 April 2013].

²²Pratyush, “UN Arms Treaty: A Sore Spot for India’s Military” *The Diplomat*, 12 April, (2013) Tersedia di <<http://thediplomat.com/the-pulse/2013/04/12/un-arms-treaty-a-sore-spot-for-indias-military/>>, [Diakses 22 April 2013]. Lihat juga Ita Lismawati Malau & Nur Eka Sukmawati, “Ironis, Indonesia Masih Impor Alusista”, *Viva News*, 28 Agustus 2012, <<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/346843-ironis--indonesia-masih-impor-alutsista>>, [Diakses 22 April 2013].

berasal dari negara-negara berkembang, keputusan untuk menolak ATT akan dianggap kontradiktif dengan semangat perlindungan HAM yang terdapat di dalam ATT. Sementara keputusan untuk menerima sepenuhnya isi dari ATT akan berdampak pada penilaian HAM dalam negeri mereka oleh negara eksportir senjata. Oleh karena itu, pilihan untuk abstain dalam voting ATT adalah keputusan yang paling rasional untuk diambil.

Lalu siapa yang memperoleh keuntungan lebih dari perjanjian ini? Implementasi ATT tentunya akan menguntungkan negara-negara eksportir senjata seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris yang mendukung persyaratan penjualan senjata dengan melihat kondisi HAM negara-negara klien. Persyaratan tersebut akan menjamin *balance of power* tetap ada pada negara-negara besar ini. Selain perolehan relatif, negara-negara Barat ini juga akan mendapat perolehan absolut berupa semakin kuatnya nilai-nilai Barat seperti demokrasi dan HAM, di dalam sistem internasional.

2. Mengapa Indonesia Memilih untuk Abstain dalam Voting ATT?

Salah satu asumsi dari realisme adalah negara adalah sebuah unit kesatuan (*state as a unitary actor*). Asumsi ini dimunculkan kelompok realis untuk menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sebuah negara adalah representasi dari negara tersebut. Artinya hanya satu kebijakan yang dihasilkan terhadap sebuah isu. Terkait dengan asumsi tersebut, kelompok realis berpendapat bahwa dalam mengambil kebijakan, negara adalah aktor rasional.²³

Rasionalitas apa yang dibicarakan oleh kelompok realis? Menurut Graham T Allison yang dimaksud dengan rasionalitas adalah “pilihan yang konsisten dan paling bernilai dalam sebuah keterbatasan”.²⁴ Negara dikatakan sebagai aktor rasional karena pertama: kebijakan yang dibuat negara didasarkan kepada tujuan yang hendak dicapainya (*purposive action*). Kedua, negara harus konsisten dalam membuat prioritas dari beberapa pilihan yang ada (*consistent preferences*). Ketiga, negara akan memilih dari pilihan yang ada kebijakan mana yang akan menguntungkannya (*utility maximation*).²⁵

²³Paul Viotti & Mark Kauppi, *International Relations Theory*, 4th ed., (New York: Pearson, 2010)

²⁴Alex Mintz & Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) hal. 57

²⁵*ibid.*

Apakah pilihan Indonesia untuk abstain dalam voting ATT adalah kebijakan yang rasional? Patut diingat bahwa menurut kelompok realis negara hanya akan terlibat dalam sebuah kerja sama karena negara tersebut melihat ada kepentingan yang hendak dicapai dalam kerja sama tersebut. ATT berbicara tentang pengaturan perdagangan senjata yang kalau tidak diawasi dengan baik akan berpotensi mengancam keamanan di dalam dan luar negeri. Bayangkan apabila transfer senjata dengan mudahnya dilakukan antar individu atau kelompok untuk digunakan untuk tindakan kriminal. Ikutnya Indonesia dalam ATT didasari pada fakta bahwa transaksi senjata ilegal terjadi di Indonesia dan transaksi yang sebagian besar melewati lintas batas negara berpotensi mengancam keamanan dalam negeri.²⁶

Pilihan-pilihan apa yang dihadapi oleh Indonesia? Pertama, apabila Indonesia ikut menyetujui ATT, Indonesia akan terikat dengan seluruh isi perjanjian tersebut. Salah satu isi dari ATT memberikan kewenangan bagi negara-negara eksportir senjata untuk menilai perlindungan HAM negara klien sebelum melakukan transaksi jual beli senjata. Sebagai negara yang masih bergantung pada pembelian senjata dari luar negeri tentunya hal ini akan memberatkan Indonesia. Pertama karena perlindungan HAM di dalam negeri belum dilakukan dengan maksimal walaupun Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi perlindungan HAM. Laporan Human Rights Watch tahun tahun 2012 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terkesan hanya memberikan janji tanpa menunjukkan keinginan untuk mengambil langkah nyata untuk masalah-masalah pelanggaran HAM di dalam negeri.²⁷ Kedua karena persyaratan HAM yang diterakan di dalam ATT tersebut bertentangan dengan UU tentang Industri Pertahanan Indonesia yang menyebutkan bahwa transaksi jual beli senjata dengan negara eksportir harus terjadi tanpa ikut campurnya negara eksportir terhadap kondisi dalam negeri Indonesia.²⁸

Pilihan kedua adalah menolak ATT. Pilihan ini tentunya akan memiliki konsekuensi yang besar bagi Indonesia. Pertama, Indonesia dianggap tidak memiliki komitmen terhadap kelangsungan perdamaian dan perlindungan HAM. Kedua, kasus transaksi senjata ilegal yang

²⁶Anggi Setio Rachmanto, "Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V. No. II, (2009) 31-46

²⁷Human Rights Watch, *World Report 2012: Indonesia* (Human Rights Watch, 2012) Tersedia di <<http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-indonesia>>, [Diakses 1 Mei 2013]

²⁸"Indonesia Abstain Soal Traktat Perdagangan Senjata", *Tempo*, 4 April 2013. Tersedia di <<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/04/118471104/Indonesia-Abstain-Soal-Traktat-Perdagangan-Senjata>> [Diakses 1 Mei 2013]

melewati lintas batas teritorial akan semakin marak di Indonesia. Indonesia akan disulitkan dengan penanganan kasus transaksi ilegal yang hingga saat ini belum disertai dengan “pemberantasan pada sumber pengadaan senjata”.²⁹ Ketiga, proses pembelian senjata kepada negara-negara eksportir akan tersendat karena Indonesia dicurigai akan menggunakan senjata untuk tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Kasus penyerbuan ke Lapas Cebongan oleh oknum militer pada bulan April 2013 adalah salah satu contoh kasus yang akan digunakan negara eksportir untuk menunda penjualan senjata kepada Indonesia.

Pilihan ketiga adalah mengambil posisi abstain. Mengambil posisi abstain berarti bahwa ada upaya untuk mengimbangi kekuatan negara-negara eksportir yang lebih diuntungkan dari isi ATT. Indonesia dan juga negara-negara importir senjata lainnya akan tentunya akan mengupayakan agar persyaratan tentang perlindungan HAM di dalam negeri dapat diubah.

Dari tiga pilihan di atas, keputusan yang rasional adalah dengan mengambil posisi abstain dalam voting ATT. Indonesia dengan 22 negara lain yang mayoritas adalah negara importir senjata menunjukkan keberatannya terhadap klausul HAM yang dimasukkan ke dalam ATT. Posisi abstain ini adalah upaya *bargaining* negara-negara importir kepada negara-negara eksportir senjata yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap implementasi dari ATT ke depannya. Posisi abstain adalah keputusan yang lebih menguntungkan Indonesia karena menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dalam upaya perdamaian dan perlindungan HAM tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional.

3. Mengapa Korea Utara, Iran dan Suriah Menolak ATT

Di dalam melihat kerja sama internasional, kelompok realis menilai ada dua hal yang menjadi perhatian negara: perolehan relatif negara (*relative gains*) dan kecurangan yang dilakukan negara lain. Kondisi di mana ada beberapa negara yang memaksimalkan kepentingan mereka dalam organisasi internasional yang kemudian menimbulkan beragam sikap negara dalam kerja sama internasional. Grieco menyebutkan bahwa negara bisa saja “menolak untuk ikut, meninggalkan kerja sama tersebut, atau membatasi komitmen apabila negara-negara lain akan memperoleh keuntungan lebih dari kerja sama tersebut”.³⁰

²⁹Rachmanto, *op.cit.*, hal. 39

³⁰Grieco, *op.cit.*, hal. 499

Bagaimana *realpolitik* dari perjanjian multilateral ATT? Patut diketahui bahwa perdagangan senjata konvensional adalah bisnis yang besar dan menguntungkan. Data tahun 2008 menunjukkan hasil perdagangan senjata mencapai \$80 milyar dan lebih dari separuh total perdagangan tersebut berasal dari negara-negara pemilik hak veto (*Permanent Five-P5*) di dalam PBB.³¹ Bagaimana ATT mewakili kepentingan negara-negara eksportir senjata? Salah satunya dengan memasukkan nilai HAM sebagai syarat penjualan senjata. Dengan aturan ini, negara-negara eksportir senjata bisa mengawasi penjualan senjata konvensional di dunia dan melemahkan kelompok negara-negara yang dianggap akan mengganggu *balance of power* yang sudah terbentuk. Negara-negara eksportir senjata yang mayoritas adalah negara-negara Barat juga akan diuntungkan oleh ATT karena ATT mendukung pengaruh mereka melalui penyebaran nilai-nilai seperti: demokrasi dan HAM.

Pertimbangan akan *relative gains* dan kecurangan inilah yang menyebabkan Korea Utara, Iran dan Suriah menolak untuk menandatangani ATT. Pertama, kerja sama melalui perjanjian multilateral ATT hanya akan menguntungkan negara-negara eksportir senjata karena memberikan kewenangan yang lebih untuk menilai perlindungan HAM di negara mereka. Persyaratan HAM ini akan memberatkan karena bukan saja ketiga negara ini memiliki masalah dengan perlindungan HAM di dalam negara tapi juga ketiganya tengah dihadapkan dengan dilema keamanan baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Kedua, ketiga negara ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan perjanjian ATT tidak akan mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Baik Iran dan Korea Utara adalah negara-negara yang dikenakan sanksi ekonomi dan sanksi militer oleh PBB melalui Dewan Keamanan.³² Sanksi tersebut sangat berdampak pada memburuknya perekonomian dan pertahanan keamanan kedua negara. Kondisi di mana keduanya tengah dihadapkan oleh dilema keamanan dengan negara tetangga (Iran dengan Israel, Korea Utara dengan Korea Selatan) mengakibatkan negara-negara ini harus selalu waspada terhadap kemungkinan serangan dari lawannya. ATT hanya akan menghambat negara-negara ini untuk memperoleh pasokan senjata ke negaranya.

³¹ Finardi, Wood, Danssaert, Matthysen, *loc. cit.*

³² Global Policy Forum, *Security Council Issues* (Global Policy Forum, 2013) Tersedia di <<http://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda.html>>, [Diakses 23 Mei 2013]

Kalau kedua negara sebelumnya menghadapi ancaman dari luar, Suriah tengah menghadapi ancaman yang datang dari dalam negara. Konflik sipil yang telah berlangsung dari tahun 2011 dan memunculkan beragam kelompok yang menginginkan rezim Bashar Al-Assad turun. Tindakan pemerintah Suriah yang terbukti telah melakukan pelanggaran HAM berat atas warga negaranya akan memberatkan posisi Suriah sebagai negara importir senjata. Negara-negara eksportir senjata yang tidak berpihak pada Assad tentunya tidak akan menjual senjata kepada Suriah.

4. Bagaimana Masa Depan dari Rezim Perdagangan Senjata di Bawah ATT

Liberal institusionalisme adalah salah satu varian dari paham liberal yang menekankan pada “peran dari institusi (formal maupun tidak formal) untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan liberal”.³³ Kelompok liberal institusionalisme ini memiliki asumsi dasar sebagai berikut: 1) negara adalah aktor utama dalam politik internasional yang rasional dan *unitary*. 2) Perilaku dan motivasi negara dipengaruhi oleh sistem internasional yang anarki. 3) Institusi internasional berperan sebagai wadah kerja sama antar negara dan tidak pesimis menilai prospek kerja sama melalui institusi internasional. Kerja sama internasional sangat mungkin terjadi karena negara-negara memikirkan perolehan absolut (*absolute gains*). Keyakinan negara-negara bahwa kerja sama ini pada akhirnya akan menguntungkan bagi semua pihaklah yang menyebabkan negara mau ikut di dalam kerja sama internasional.³⁴

Salah satu bentuk kerja sama yang menjadi perhatian kelompok liberal institusionalisme adalah rezim internasional. Rezim internasional didefinisikan sebagai “prinsip-prinsip, baik implisit maupun eksplisit, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi para aktor menyatu di dalam satu area hubungan internasional”.³⁵ Rezim internasional ini bukanlah aktor seperti negara ataupun organisasi internasional dan oleh sebab itu keberlangsungan sebuah rezim dan efektifitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi tentunya akan ditentukan oleh interaksi aktor-aktor yang terikat di dalam rezim tersebut.

Apa saja yang menentukan efektifitas sebuah rezim? Ada beberapa pendapat tentang ukuran yang digunakan untuk melihat efektifitas rezim internasional. Frank Biermann dan

³³Andrew Heywood, *Global Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011) hal. 65.

³⁴Grieco, *loc. cit.*

³⁵Stephan Haggard & Beth Simmons, “Theories of International Regimes”, *International Organization*, Vol. 41, No. 3, (1987), 491-517, (hal. 493)

Steffen Bauer³⁶ mengatakan bahwa dimensi-dimensi seperti: *output* berupa aktivitas rezim, *outcome* yaitu perubahan tingkah laku aktor dan *impact* berupa perubahan yang dapat terlihat, dapat digunakan untuk melihat efektif atau tidaknya sebuah rezim. Sedangkan menurut Andrea Liverani³⁷, efektifitas sebuah rezim ditentukan oleh: tingkat partisipasi anggota, tindakan yang nyata dari anggota dan ketaatan anggota atas aturan-aturan yang terdapat di dalam rezim.

Perjalanan ATT untuk menjadi sebuah rezim yang mengatur perdagangan senjata konvensional masih panjang. Pertama, untuk dapat difungsikan perjanjian ini masih harus menunggu ratifikasi dari 50 negara anggota PBB. Kedua, negara-negara yang telah meratifikasi ATT tentu saja akan melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas detail pengaturan perdagangan senjata konvensional tersebut. Melihat perpecahan suara dalam voting dan juga berbagai reaksi dari kelompok HAM dan kelompok bisnis, maka efektifitas rezim ini akan ditentukan oleh beberapa hal.

Pertama, menarik untuk dilihat bahwa kelima negara pemegang hak veto (*Permanent Five*) adalah negara-negara yang paling berkepentingan dalam industri persenjataan.³⁸ Sebagai negara-negara eksportir senjata terbesar tentunya mereka saling bersaing untuk memastikan kepentingan mereka tidak terganggu dengan adanya perjanjian ATT. Di dalam voting tanggal 2 April 2013, China dan Rusia mengambil posisi abstain. Perwakilan dari Rusia di PBB yang menyebutkan bahwa Rusia akan mempertimbangkan kembali segala sesuatunya sebelum menandatangani perjanjian ATT³⁹ menunjukkan beberapa hal. Pertama, ATT yang menyertakan prasyarat HAM akan mengganggu perdagangan senjatanya ke negara-negara klien yang kebanyakan adalah negara-negara yang memiliki catatan pelanggaran HAM.⁴⁰ Kedua, Rusia (termasuk juga China) adalah negara-negara yang memiliki permasalahan terhadap perlindungan HAM. Kondisi ini akan berdampak pada keberlangsungan rezim perdagangan senjata karena ATT tidak akan segera ditandatangani oleh Rusia dan China. Jika dikembalikan

³⁶Frank Biermann & Steffen Bauer, *Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics*, *Global Environmental Change*, Vol. 14, (2004), 189-193.

³⁷Andrea Liverani, *Success and Failure in International Regimes* (The World Bank Group, 2010) Tersedia di <<http://blogs.worldbank.org/climatechange/success-and-failure-international-regimes>>, [Diakses 14 Mei 2013]

³⁸Finardi, Wood, Danssaert, Matthysen, *loc. cit.*

³⁹Louis Charbonneau, 2013. "U.N. Overwhelmingly Approves Global Arms Trade Treaty", *Reuters*, 2 April. Tersedia di <<http://www.reuters.com/article/2013/04/02/us-arms-treaty-un-idUSBRE9310MN20130402>>, [Diakses 14 Mei 2013].

⁴⁰Amnesty International, *loc.cit.*

pada efektifitas rezim, rezim yang tidak mendapat dukungan penuh dari negara-negara besar tentunya akan menjadi rezim yang lemah.

Kedua, seperti yang disebutkan sebelumnya, efektifitas rezim akan ditentukan oleh ketaatan anggota rezim terhadap aturan-aturan yang ada. Di dalam voting tanggal 2 April 2013, banyak negara-negara importir senjata yang mengambil posisi abstain karena keberatan dengan prasyarat HAM yang dimasukkan sebelum jual beli senjata. Perpecahan suara pada voting bulan April tersebut menunjukkan bahwa aturan-aturan yang dibuat masih belum bisa mengakomodir seluruh kepentingan negara-negara. Apabila rezim perdagangan senjata masih memiliki aturan-aturan yang dianggap mengganggu kedaulatan negara, seperti persyaratan HAM di atas, tentu rezim ini tidak akan bisa bekerja efektif.

Ketiga, efektifitas rezim perdagangan senjata juga akan dipengaruhi oleh keberadaan kelompok-kelompok kepentingan seperti kelompok bisnis senjata, kelompok HAM dan lain sebagainya. Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menyetujui ATT pada voting tanggal 2 April 2013 di PBB ditentang keras oleh *National Rifle Association* (NRA), sebuah organisasi pro kepemilikan senjata dari AS. Mengapa NRA tidak setuju dengan kebijakan AS mendukung ATT? ATT tentunya akan berdampak pada pengaturan kepemilikan senjata di AS, suatu hal yang tidak diinginkan oleh NRA dan perusahaan-perusahaan senjata di AS. Sebagai salah satu kelompok lobi kuat di Washington⁴¹ NRA tentunya akan berupaya agar ATT tidak diratifikasi oleh Senat AS. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, partisipasi dari negara super power dalam sebuah rezim akan menentukan kuat atau lemahnya rezim tersebut. Apabila Senat AS tidak meratifikasi ATT maka otomatis rezim perdagangan senjata akan berjalan tanpa AS sebagai salah satu negara *superpower*.

Simpulan

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara level analisis dengan teori HI. Kasus voting ATT di markas PBB di New York pada tanggal 2 April 2013 diangkat untuk menunjukkan pengaplikasian level analisis sistem dan teori neo-realis dan neo-liberalis. Di dalam level analisis sistem, fokus penelitian terdapat pada lingkungan tempat aktor-aktor

⁴¹ Brian Palmer, "Why Is the NRA So Powerful?", *Slate*, 18 Desember 2012 Tersedia di <http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2012/06/eric_holder_charged_with_contempt_how_did_the_nra_swing_the_votes_of_so_many_democrats_.html>, [Diakses 14 Mei 2013].

berinteraksi. Selain itu, level analisis juga melihat bagaimana lingkungan (sistem internasional) tersebut berpengaruh terhadap perilaku aktor.

Dua teori HI yaitu neo-realis dan neo-liberal berangkat pada asumsi yang sama bahwa karakter dari sistem internasional yang anarkilah yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh negara-negara di dunia. Walaupun sama-sama menyetujui pengaruh sistem internasional yang anarki, baik teori neo-realis dan neo-liberal berbeda dalam melihat bentuk interaksi antar negara. Bagi kelompok neo-realis, politik internasional selalu diwarnai dengan kecurangan dan konflik. Sebaliknya kelompok neo-liberal percaya bahwa dampak negatif dari anarki internasional itu bisa diminimalisir dengan menciptakan institusi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International, *The 'Big Six' Arms Exporters*, (Amnesty International, 2012) Tersedia di <<http://www.amnesty.org/en/news/big-six-arms-exporters-2012-06-11>>, [Diakses 22 April 2013]
- _____. *Iran, North Korea and Syria Cynically Block Lifesaving UN Arms Treaty*, (Amnesty International, 2013) Tersedia di <<http://www.amnesty.org.au/news/comments/31449/>>, [Diakses 22 April 2013].
- Biermann, F. & Bauer, S., "Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics", *Global Environmental Change*, Vol. 14, (2004).
- Charbonneau, L., "U.N. Overwhelmingly Approves Global Arms Trade Treaty", *Reuters*, 2 April 2013 Tersedia di <<http://www.reuters.com/article/2013/04/02/us-arms-treaty-un-idUSBRE9310MN20130402>>, [Diakses 14 Mei 2013].
- D'Anieri, P., *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, 2nd ed., (Boston: Wadsworth, 2012).
- Tim Dunne, "Liberalism" dalam *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, dieditori John Baylis & Steve Smith (Oxford: Oxford University Press, 2001).
- Finardi, S., Wood, B., Danssaert, P. & Matthysen, K., "The Arms Trade Treaty: Building A Path to Disarmament", *Solutions*, Vol. 4, Iss. 3 (2013) Tersedia di <<http://thesolutionsjournal.anu.edu.au/node/2271>>, [Diakses 22 April 2013].

- Global Policy Forum, *Security Council Issues* (Global Policy Forum, 2013) Tersedia di <<http://www.globalpolicy.org/security-council/index-of-countries-on-the-security-council-agenda.html>>, [Diakses 23 Mei 2013].
- Grieco, J.M., "Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism", *International Organization*, Vol. 42, Iss. 3, (1988).
- Haggard, S. & Simmons, B.A., "Theories of International Regimes", *International Organization*, Vol. 41, No. 3, (1987).
- Heywood, A., *Global Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011).
- Human Rights Watch, *World Report 2012: Indonesia* (Human Rights Watch, 2012) Tersedia di <<http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-indonesia>>, diakses 1 Mei 2013.
- Liverani, A., *Success and Failure in International Regimes* (The World Bank Group, 2010) Tersedia di <<http://blogs.worldbank.org/climatechange/success-and-failure-international-regimes>>, [Diakses 14 Mei 2013].
- Malau, I & Sukmawati, N.E., "Ironis, Indonesia Masih Impor Alusista", *Viva News*, 28 Agustus 2012, <<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/346843-ironis--indonesia-masih-import-alutsista>>, [Diakses 22 April 2013].
- Mearsheimer, J.J., "The False Promise of International Institutions", *International Security*, Vol. 19, No. 3, (1994).
- _____, Structural Realism. Dalam Dunne, T., Kurki, M., Smith, S., *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, (Oxford: Oxford University Press, 2006)
- Mintz, A. & DeRouen, K., *Understanding Foreign Policy Decision Making*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
- Oxfam, *Arms Trade Treaty May Point a Way Forward for the U.N.*, (Oxfam, 2013) Tersedia di <<https://www.oxfam.org.au/2013/04/arms-trade-treaty-may-point-a-way-forward-for-the-u-n/>>, [Diakses 22 April 2013].
- Palmer, B., "Why is the NRA So Powerful?", *Slate*, 18 Desember 2012. Tersedia di <http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2012/06/eric_holder_charge_d_with_contempt_how_did_the_nra_swing_the_votes_of_so_many_democrats_.html>, [Diakses 14 Mei 2013].
- Perserikatan Bangsa Bangsa, *Arms Trade Treaty*, (Perserikatan Bangsa Bangsa, 2013) Tersedia di <http://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410%2012-01%20PM/Ch_XXVI_08.pdf#page=21> [Diakses 25 Juni 2013].

- Pratyush, UN Arms Treaty: A Sore Spot for India's Military. *The Diplomat*, 12 April 2013, <<http://thediplomat.com/the-pulse/2013/04/12/un-arms-treaty-a-sore-spot-for-indias-military/>>, [Diakses 22 April 2013].
- Rachmanto, A.S., "Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Illegal di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V. No. II, (2009).
- Rourke, J. T., *International Politics on the World Stage*, 5th ed., (Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995).
- Bruce Russett & Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W. H. Freeman Company, 1996).
- Singer, D. J., The Level-of-Analysis Problem in International Relations, *World Politics*, Vol. 14, No. 1 (1961).
- Slaughter, A, International Relations, Principal Theories, (Princeton: Princeton University, 2011) Tersedia di <http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf> [Diakses 1 Juli 2013].
- UNODA, *About the Arms Trade* (UNODA, 2013) <<http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTrade/>>, [Diakses 31 Maret 2013].
- _____, *The Arms Trade Treaty* (UNODA, 2013) Tersedia di <<http://www.un.org/disarmament/ATT/>> Diakses 25 Juni 2013.
- Viotti, P.R. & Kauppi, M.V., *International Relations Theory*, 4th ed., (New York: Pearson, 2010).
- Waltz, K., *Theory of International Politics*, (London: Addison-Wesley Publishing Company).

